

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Subsidi BBM Kapal Rp 4,8 Miliar

## ► Pemprov Siapkan Jaring Pengaman

### Gambir, Warta Kota

Sektor transportasi menjadi salah satu yang terdampak atas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Namun, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar transportasi umum bisa beroperasi tetap dengan harga norma.

Salah satunya Pemprov menggelontorkan subsidi BBM sebesar Rp 4,8 miliar untuk angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu.

"Kapal ke Kepulauan Seribu kami subsidi Rp 4,8 miliar," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria dikutip dari Kompas.com, Minggu (11/9/2022).

Adapun bantuan subsidi angkutan kapal itu diberikan berbarengan dengan subsidi BBM sebesar Rp 62,5 miliar kepada TransJakarta.

Ia berharap subsidi BBM itu membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sehingga, tarif TransJakarta dan angkutan kapal laut menuju Kepulauan Seribu tidak naik.

"Jadi Insya Allah kami bantu subsidi untuk transportasi agar membantu masyarakat di tengah kenaikan harga BBM," katanya.

Namun angkutan umum perkotaan (angkot) yang belum terintegrasi dengan JakLingko tidak mendapatkan subsidi sehingga tarif angkutan umum ikut menyesuaikan dengan harga BBM.

Berdasarkan data dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, jumlah angkutan umum mikrolet yang belum terintegrasi mencapai sekitar 4.500 unit, dari total sekitar 6.600 unit.

Sedangkan sisanya sekitar 2.100 unit mikrolet sudah terintegrasi dengan JakLingko dengan nama Mikrotrans. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan, besaran usulan kenaikan tarif angkot reguler sebesar Rp 1.000 sehingga menjadi

Rp 6.000.

Usulan kenaikan tarif itu disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada Gubernur DKI melalui Dinas Perhubungan DKI.

DTKJ terdiri atas Dinas Perhubungan, pakar transportasi, unsur operator angkutan umum, lembaga swadaya masyarakat bidang transportasi dan unsur Kepolisian.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalkan sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari pemerintah pusat segera disalurkan dengan baik.

Hal itu dilakukan supaya masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif. "Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan," ujar Anies. (faf/Kompas.com)